

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena Laporan Program Kegiatan Tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang telah selesai disusun.

Laporan ini disusun sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18).

Diharapkan Laporan Program Kegiatan Tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini dapat dipergunakan sebagai bahan laporan dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota akhir tahun 2021 dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Januari 2022
SEKRETARIS DPRD
KOTA PANGKALPINANG,

Drs. AKHMAD ELVIAN
Pembina Utama Muda
NIP. 196510141989031004

BAB I

PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 tahun 2006 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas pokok sebagai pemberian pelayanan administrasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD.

Fungsi Sekretariat DPRD:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Secara lebih gamblangnya tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan sub bagian dijelaskan sebagai berikut:

1. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
3. Pelaksanaan lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum di lingkup Tata Usaha dan Kepegawaian.

Fungsi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian:

1. Penyiapan data di lingkup Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD;
2. Melaksanakan petunjuk teknis di lingkup Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD;
3. Pelaksanaan di lingkup umum dan kepegawaian yang meliputi penatausahaan naskah dinas, dan kearsipan; penyiapan bahan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD; pengaturan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD; pelayanan pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan Sekretariat DPRD; Pengaturan akomodasi pimpinan dan anggota DPRD; pemberian pelayanan, pengaturan, pengelolaan, pengadaan perlengkapan dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.
4. Penyelenggaraan dan pelaksanaan dilingkup kepegawaian, meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi dan pembinaan, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, diklat dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai) dilingkungan Sekretariat DPRD; pengadministrasian keanggotaan DPRD; pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan kepegawaian pada bagian dilingkungan Sekretariat DPRD; dan
5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup umum dan kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD.

1.2 Sub. Bagian Humas dan Protokol

Mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian umum di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Fungsi Sub. Bagian Rumah Tangga :

1. Penyiapan data di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
2. Pelaksanaan petunjuk teknis di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
3. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol, meliputi fasilitas hubungan kerjasama DPRD dengan instansi Pemerintah, dan lembaga sosial lainnya; Pemberian pelayanan dan fasilitas aspirasi masyarakat yang di tujukan kepada DPRD; Pemberian pelayanan dan fasilitas informasi pers yang ditujukan kepada masyarakat; Penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan serta anggota DPRD; Pelayanan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD; pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; Penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; Pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; Pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; Penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD.

2. BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH, PERUNDANG-UNDANGAN, DAN JDIH

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD di lingkungan Persidangan, dan Risalah serta Perundang-undangan.

Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup Persidangan, dan Risalah serta Perundang-undangan;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Persidangan, dan Risalah serta Perundang-undangan;

3. Pelaksanaan persidangan, dan Perundang-undangan lingkup Persidangan, dan Risalah serta Perundang-undangan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Persidangan, dan Risalah serta Perundang-undangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan sekretariat DPRD.

2.1 SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

Sub. Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian persidangan, dan perundang-undangan lingkup pelayanan dan persidangan.

Fungsi Sub Bagian Persidangan :

1. Penyiapan data lingkup persidangan dan risalah;
2. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup persidangan dan risalah;
3. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah yang meliputi pelayanan teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat; penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat; fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup pelayanan persidangan dan rapat.

2.2 SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN JDIH

Sub Bagian perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Perundang-undangan.

Fungsi Sub. Bagian perundang-undangan:

1. Penyiapan data lingkup Perundang-undangan;
2. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Perundang-undangan yang meliputi penyediaan bahan referensi kepustakaan lingkup Perundang-undangan, dokumentasi dan pengarsipan hasil persidangan atau rapat; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup pelayanan risalah.

3. BAGIAN KEUANGAN

Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup keuangan.

Sub Bagian keuangan memiliki tugas :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup keuangan;
2. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup keuangan ;
3. Pelaksanaan keuangan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Sekretaris DPRD yang sesuai tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian keuangan lingkup Anggaran.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi adalah :

1. Penyiapan data lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
2. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
3. Pelaksanaan lingkup Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD), penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Sekretariat DPRD), penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Sekretariat DPRD);
4. Pelaksanaan lingkup Anggaran dan Verifikasi yang meliputi melaksanakan verifikasi (pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan

5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi.

3.2. SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PEMBUKUAN

Sub Bagian perbendaharaan dan pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

Fungsi Sub Bagian keuangan lingkup perbendaharaan adalah :

1. Penyiapan data lingkup perbendaharaan dan pembukuan;
2. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan dan pembukuan;
3. Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan pembukuan yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat DPRD, serta penyusunan laporan keuangan; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup perbendaharaan dan pembukuan.

Sumber Daya SKPD

Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang terdiri dari 3 bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Persidangan. Oleh karena itu, masing-masing bagian memiliki Sub Bagian dan Staf yang bertugas menjalankan fungsi masing-masing Sub Bagian.

- a. Bagian Umum terdiri dari:
 - Sub Bagian Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri dari 1 Kasubbag dan 13 staf
 - Sub Bagian Humas, Protokol dan Perjalanan Dinas terdiri dari 1 Kasubbag dan 5 staf
- b. Bagian Persidangan, Perundang-Undangan dan JDIH terdiri dari:
 - Sub Bagian Perundang-Undangan dan JDIH terdiri dari 1 Kasubbag dan 3 staf
 - Sub Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari 1 Kasubbag dan 3 staf
- c. Bagian Keuangan terdiri dari:
 - Sub Bagian PEP, Anggarandan Verifikasi terdiri dari 1 Kasubbag dan 4 staf

- Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan terdiri dari 1 Kasubbag dan 4 staf

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Sekretariat DPRD ialah 33 orang yang terdiri dari:

- 1) Eselon II (Sekretaris) :1 orang
- 2) Eselon III (Kabag) : 3 orang
- 3) Eselon IV (Kasubbag) : 6 orang
- 4) Staf golongan III/c : 4 orang
- 5) Staf golongan III/b : 4 orang
- 6) Staf golongan III/a : 7 orang
- 7) Staf golongan II/d : 9 orang
- 8) Staf golongan II/b : 2 orang
- 9) Staf golongan II/a :1 orang
- 10) Staf golongan I/d : 1 orang

Jumlah Pegawai Honorer sebanyak 108 orang yang terbagi atas:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Perkantoran : 12 orang
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan : 11 orang
- 3) Kegiatan publikasi DPRD : 14 orang
- 4) Kegiatan Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD : 49 orang
- 5) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Tenaga Ahli (Sekretaris) : 16 orang
- 6) Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 6 orang

Total jumlah pegawai keseluruhan di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ialah sebanyak 146 orang. Berdasarkan data yang ada, Sekretariat DPRD mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan lebih lanjut demi tercapainya tujuan SKPD ke depan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 11.699.871.990,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 2.591.830.224,00 menjadi Rp. Rp. 9.108.041.766,00 (sembilan milyar seratus delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) meliputi kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 10.998.900,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 10.998.900,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan kegiatan ini tidak dilaksanakan. Meliputi sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.499.900,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 5.499.900,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.

5.499.900,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 5.499.900,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksud agar terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan dengan alokasi dana pagu induk sebesar Rp. 8.036.586.880,00 (delapan milyar tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 891.878.494,00 menjadi Rp. Rp. 7.144.708.3 (tujuh milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Sasaran kinerja yaitu persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan. Target kinerja 100% dengan pencapaian kinerja 98%. Meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 8.036.586.880,00 (delapan milyar tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 891.878.494,00 menjadi Rp. Rp. 7.144.708.386 (tujuh milyar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 7.015.028.747,00 terdiri dari belanja gaji pokok sebesar Rp. 1.473.942.000,00. Belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp. 156.456.698,00. Belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 120.330.000,00. Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp. 57.715.000,00. Tunjangan beras PNS sebesar Rp. 99.287.820,00. Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 2.926.884,00. Belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 20.345,00. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp. 1.122.750.000,00. Belanja

tunjangan komunikasi isentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.780.000.000,00. Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp. 201.600.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan dengan target kinerja 35 orang dengan pencapaian 35 orang.

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.499.900,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 5.499.900,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.499.900,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 5.499.900,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 79.972.000,00 menjadi Rp. Rp. 55.028.000 (lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 50.020.200,00. Sasaran kinerja yaitu persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 91%. Meliputi sub kegiatan:

1. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 79.972.000,00 menjadi Rp. Rp. 55.028.000,00 (lima puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 50.020.200,00. Terdiri dari belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp. 25.000.000,00. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 25.020.200,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dengan target kinerja 20 orang sedangkan pencapaian kinerja 20 orang.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 1.127.195.630,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 634.911.330,00 menjadi Rp. Rp. 492.284.300,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 461.859.551,00. Sasaran kinerja yaitu persentase terpenuhinya administrasi umum dengan target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 94%. Meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 24.577.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah) dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 23.435.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target kinerja 15 jenis sedangkan pencapaian kinerja 15 jenis.

2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 282.884.880,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 282.884.880,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol).

Sasaran kinerja yaitu jumlah peralatan dan perlengkapan kantor. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 197.420.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 195.500.000,00 menjadi Rp. Rp. 1.920.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 960.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan. Target kinerja 6 unit/jenis sedangkan pencapaian kinerja 4 unit/jenis.

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 354.467.250,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 132.249.250,00 menjadi Rp. Rp. 222.218.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 210.728.000,00. Dengan terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp. 54.118.000,00. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 116.610.000,00. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp. 45.000.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah bahan logistik yang disediakan. Target kinerja 2 jenis sedangkan pencapaian kinerja 2 jenis.

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 133.040.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 25.551.750,00 menjadi Rp. 107.488.250,00 (seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 92.436.250,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Target kinerja 15 unit/set sedangkan

pencapaian kinerja 13 unit/set.

6. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 23.036.000,00 (dua puluh tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 23.130.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Target kinerja 2 buku/koran sedangkan pencapaian kinerja 2 buku/koran.

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 13.725.450,00 menjadi Rp. 97.774.550,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 23.130.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan. Target kinerja 20 kali sedangkan pencapaian kinerja 20 kali.

8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 0 (nol) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 15.000.000,00. Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 15.000.000,00 terdiri dari belanja pemeliharaan website Rp. 15.000.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah website/aplikasi yang dikelola. Target kinerja 2 kali sedangkan pencapaian kinerja 2 kali.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 551.735.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 551.735.000,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu presentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan kegiatan ini tidak dilaksanakan.

Meliputi sub kegiatan :

1. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 271.735.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 271.735.000,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu kerja yaitu jumlah mebel yang diadakan. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 280.000.000,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 842.371.080,00 (delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 6.720.000,00 menjadi Rp. 835.651.080,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 730.754.809,00. Sasaran kinerja yaitu persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 87%. Meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Dengan realisasi Rp. 195.812.809,00 terdiri dari belanja tagihan telepon sebesar Rp. 2.106.008,00. Belanja tagihan listrik sebesar Rp. 140.822.277,00.

Belanja kawat/faximile/internet/tv berlangganan sebesar Rp. 52.884.524,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani. Target kinerja yaitu 170 orang pencapaian kinerja yaitu 170 orang.

2. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 64.700.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan realisasi Rp. 63.270.000,00 terdiri dari belanja suku cadang lainnya sebesar Rp. 37.375.000,00. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit personal computer sebesar 20.615.000,00. Belanja pemeliharaan komputer peralatan personal computer sebesar Rp. 5.280.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki. Target kinerja yaitu 100 unit/set dengan pencapaian kinerja yaitu 100 unit/set.

3. Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 519.671.080,00 (lima ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 6.720.000,00 menjadi Rp. 512.951.080,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 471.672.000,00. Terdiri dari belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp. 29.340.000,00. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp. 26.482.000,00. Belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 222.600.000,00. Belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 193.250.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan. Target kinerja 20 kali sedangkan pencapaian kinerja 20 kali.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 995.984.500,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus

delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 415.614.500,00 menjadi Rp. 580.370.000,00 (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 370.735.071,00. Sasaran kinerja yaitu presentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 64%. Meliputi sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 614.734.500,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 127.614.500,00 menjadi Rp. 487.120.000,00 (empat ratus delapan puluh tuju juta seratus dua puluh ribu rupiah. Dengan realisasi Rp. 355.201.071,00 terdiri dari belanja bahan-bahan bakar pelumas sebesar Rp. 105.906.071,00. Belanja jasa tenaga supir sebesar Rp. 136.340.000,00. Belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp. 112.955.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara. Target kinerja yaitu 12 unit dengan pencapaian kinerja yaitu 12 unit.

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 381.250.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 288.000.000,00 menjadi Rp. 93.250.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh riburupiah). Dengan realisasi Rp. 15.534.000,00 terdiri dari belanja bahan-bahan bakar pelumas sebesar Rp. 4.150.000,00. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat rumah tangga mebel sebesar Rp. 11.384.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara. Target kinerja yaitu 2 unit dengan pencapaian kinerja yaitu 1 unit.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 40.947.864.734,00 (empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 3.574.467.500,00 menjadi Rp. Rp. 37.373.397.234,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) meliputi kegiatan :

1. Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 6.295.475.500,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 2.349.218.350,00 menjadi Rp. Rp. 3.946.257.150,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh seratus lima puluh rupiah). Sasaran kinerja yaitu persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang di sahkan meliputi sub kegiatan :

1. Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 171.975.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 171.975.500,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu terlaksananya penyusunan dan pembahasan prapemperda. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Pembahasan Rancangan Perda

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 6.123.500.000,00 (enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 2.177.242.850,00 menjadi Rp. 3.946.257.150,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.943.954.627,00. Terdiri dari belanja alat/bahan kegiatan kantor bahan

cetak sebesar Rp. 28.256.200,00. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 18.000.000,00. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 3.799.698.427,00. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei Rp. 98.000.000,00. Sasaran kinerja yaitu kerja jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas. Target kinerja 24 perda sedangkan pencapaian kinerja 20 perda.

2. Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 5.683.113.881,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh satu) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.237.250.000,00 menjadi Rp. 4.445.863.881,00 (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta. Delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 3.573.984.330,00. Sasaran kinerja yaitu persentase peningkatan kapasitas DPRD. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 80%. Meliputi sub kegiatan:

1. Orientasi DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 4.203.213.881,00 (empat milyar dua ratus tiga juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 3.367.154.450,00 menjadi Rp. 836.059.431,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satrupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 836.059.425,00. Terdiri dari belanja jasa kontribusi asosiasi iuran asdeski k sebesar Rp. 234.500.000,00. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 601.559.425,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD . Target kinerja 1 kalisedangkan pencapaian kinerja 1 kali.

2. Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 0 (nol) bertambah sebesar Rp. 1.823.904.450,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.020.624.905,00 Terdiri dari belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp. 252.000.000,00. Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 768.624.905,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah pendalaman tugas DPRD yang diikuti. Target kinerja 6 kali sedangkan pencapaian kinerja 6 kali.

3. Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 0 (nol) bertambah sebesar Rp. 306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 270.000.000,00. (sdua ratus tujuh puluh juta rupiah). Sasaran kinerja yaitu tersedianya kelompok pakar dan tim ahli. Target kinerja 10 orang sedangkan pencapaian kinerja 10 orang.

4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 0 (nol) bertambah sebesar Rp. 1.479.900.000,00 (satu milyar empat ratus juta tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.447.300.000,00 terdiri dari belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 747.300.000,00. Belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp. 700.000.000,00. Sasaran kinerja yaitu tersedianya tenaga ahli fraksi dan tenaga administrasi . Target kinerja 40 orang kali sedangkan pencapaian kinerja 40 orang.

3. Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 130.560.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 92,329.500,00. Sasaran kinerja yaitu persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 71%. Meliputi sub kegiatan:

1. Pelaksanaan Reses

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 130.560.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 92,329.500,00. terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp.

4.455.000,00. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 5.939.500,00. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 81.825.000. Sasaran kinerja yaitu jumlah kegiatan reses yang dilakukan . Target kinerja 3 kali sedangkan pencapaian kinerja 3 kali.

4 Pembahasan Kerjasama Daerah

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 1.052.600.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 333.200.000,00 menjadi Rp. 1.385.800.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.221.875.000,00. Sasaran kinerja yaitu persentase kerjasama daerah yang dilakukan. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 88%. Meliputi sub kegiatan:

4. Penyusunan Bahan Komunikasi Dan Publikasi

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 1.052.600.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 333.200.000,00 menjadi Rp. 1.385.800.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 1.221.875.000,00 terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 38.675.000,00. Belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp. 541.800.000,00. Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan sebesar Rp. 641.400.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah jenis jasa mass media yang digunakan . Target kinerja 3 jenis sedangkan pencapaian kinerja 3 jenis.

5 Fasilitas Tugas DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 14.853.949.150,00 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 4.174.799.150,00 menjadi Rp. 10.679.150.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan realisasi

penggunaan sebesar Rp. 10.644.686.614,00. Dengan asaran kinerja yaitu persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan . Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 99%.

2. Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 14.221.849.150,00 (empat belas milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 4.174.799.150,00 menjadi Rp. 10. 040.000.000,00 (sepuluh milyar empat puluh juta rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 10.034.661.614,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah rapat-rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti. Target kinerja 60 kali sedangkan pencapaian kinerja 60 kali.

3. Penyusunan laporan kinerja DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 632.100.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 7. 050.000,00 menjadi Rp. 639.150.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 610.025.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD. Target kinerja 1 laporan sedangkan pencapaian kinerja 1 laporan.

6 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.12.664.616.203,00 (dua belas milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 3.982.500.000,00 menjadi Rp. 16.647.116.203,00 (enam belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 15.178.517.402,00. Sasaran kinerja yaitu persentase layanan keuangan dan kesejahteraan. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 91%. Meliputi sub kegiatan:

4. Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 11.747.116.203,00 (sebelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu dua ratus tiga rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 4.900.000.000,00 menjadi Rp. 16.647.116.203,00 (enam belas milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 15.178.517.402,00 terdiri dari belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.67179. 000, 00. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.75.119.100, 00. Belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.87.773. 040,00. Belanja uang paket DPRD sebesar Rp.57.582.000,00. Belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.974.095. 000,00. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.100. 302.300,00. Belanja tunjangan resep sebesar Rp.100. 945.000.000,00. Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 315.462,00.. Belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp. 6.481.865.000,00. Belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp. 5.784.675.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya. Target kinerja 30 orang sedangkan pencapaian kinerja 2 orang.

5. Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 277.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 277.500.000,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah pakaian yang disediakan. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan.

6. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp. 640.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 640.000.000,00 menjadi Rp. Rp. 0 (nol). Sasaran kinerja yaitu jumlah

terlaksananya medical check up. Permasalahan yang terjadi pada sub kegiatan tersebut terjadinya refocusing anggaran sehingga upaya untuk mengatasi permasalahan dengan sub kegiatan ini tidak dilaksanakan

7 Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.267.550.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 128.900.000,00 menjadi Rp. 138.650.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 87.500.000,00. Sasaran kinerja yaitu persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD. Target kinerja 100% sedangkan pencapaian kinerja 63%. Meliputi sub kegiatan:

5. Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD

Sub kegiatan ini dialokasikan dana pada pagu induk sebesar Rp.267.550.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang pada anggaran perubahan sebesar Rp. 128.900.000,00 menjadi Rp. 138.650.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 87.500.000,00 terdiri dari belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp. 14.600.000,00. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 49.500.000. honorrarium narasumber atau pembahas moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp. 1.400.000,00. Belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp. 22.000.000,00. Sasaran kinerja yaitu jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan. Target kinerja 3 kali sedangkan pencapaian kinerja 3 kali.

Tabel 3.1.4
fungsi Penunjang Urusan

No	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Sekretariat DPRD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI KANTOR	%	100	95	Rp 9,108,041,766	Rp 8,628,398,378			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	-	-	-	Rp -	Rp -	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja yang disusun	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100	98	Rp 7,144,708,386	Rp 7,015,028,747			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	35	35	Rp 7,144,708,386	Rp 7,015,028,747			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%	100	91	Rp 55,028,000	Rp 50,020,200		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	Orang	20	20	Rp 55,028,000	Rp 50,020,200		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%	100	94	Rp 492,284,300	Rp 461,859,551		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	15	15	Rp 24,577,500	Rp 23,435,000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Dengan Satuan)	-	-	-	-	-		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Unit /jenis	6	4	Rp 1,920,000	Rp 960,000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	2	2	Rp 222,218,000	Rp 210,728,000		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Unit /set	15	13	Rp 107,488,250	Rp 92,436,250		

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 buku/koran	2	2	Rp 23,306,000	Rp 23,130,000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan	Kali	20	20	Rp 97,774,550	Rp 96,170,301			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah website/aplikasi yang dikelola	Kali	2	2	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	Rp -	Rp -	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	87	Rp 835,651,080	Rp 730,754,809			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	Orang	170	170	Rp 258,000,000	Rp 195,812,809			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Unit/set	100	100	Rp 64,700,000	Rp 63,270,000			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	20	19	Rp 512,951,080	Rp 471,672,000			

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	64	Rp 580,370,000	Rp 370,735,071			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	12	12	Rp 487,120,000	Rp 355,201,071			
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang di pelihara	Unit	2	1	Rp 93,250,000	Rp 15,534,000			
2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE TERLAKSANANYA TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100	93	Rp 37,373,397,234	Rp 34,742,737,473			
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan	%	100	100	Rp 3,946,257,150	Rp 3,943,954,627			
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	terlaksananya penyusunan dan pembahasan propemperda	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan Peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas	Perda	24	20	Rp 3,946,257,150	Rp 3,943,954,627			

				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	100	80%	Rp 4,445,863,881	Rp 3,573,984,330			
				Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kali	1	1	Rp 836,059,431	Rp 836,059,425			
				Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	Kali	6	6	Rp 1,823,904,450	Rp 1,020,624,905			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahl	Orang	10	10	Rp 306,000,000	Rp 270,000,000			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	tersedianya Tenaga ahli Fraksi dan Tenaga Administrasi	Orang	40	40	Rp 1,479,900,000	Rp 1,447,300,000			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%	100	71	Rp 130,560,000	Rp 92,219,500			
				Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	Kali	3	3	Rp 130,560,000	Rp 92,219,500			
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan kerjasama daerah yang dilakukan	%	100	88	Rp 1,385,800,000	Rp 1,221,875,000			
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan	Jenis	3	3	Rp 1,385,800,000	Rp 1,221,875,000			
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan	%	100	100	Rp 10,679,150,000	Rp10,644,686,614			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas, DPRD	Jumlah Rapat rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti	Kali	60	60	Rp 10,040,000,000	Rp10,034,661,614			
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	Laporan	1	1	Rp 639,150,000	Rp 610,025,000			

				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	persentase terpenuhinya layanan Keuangan dan Kesejahteraan	%	100	91	Rp 16,647,116,203	Rp 15,178,517,402			
				Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	30	30	Rp 16,647,116,203	Rp 15,178,517,402			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian yang disediakan	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up	-	-	-	-	-	Anggaran kegiatan dialihkan	Kegiatan tidak dilaksanakan	
				Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)	persentase terpenuhinya layanan Administrasi DPRD	%	100	63%	Rp 138,650,000	Rp 87,500,000			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	Kali	3	3	Rp 138,650,000	Rp 87,500,000			
TOTAL									Rp 46,481,439,000	Rp 43,371,135,851			

Pangkalpinang, Januari 2022
 SEKRETARIS DPRD
 KOTA PANGKALPINANG,

Drs. AKHMAD ELVIAN
Pembina Utama Muda
 NIP. 196510141989031004

